

PERINDUSTRIAN EKONOMI KREATIF DAN PENANAMAN MODAL USAHA KECIL MENENGAH DI TANJUNGPINANG

Ebi Tetanisa Masunggang¹, Muhammad Rahman Kurniawan², Selomita Amanda³

¹ STIE Pembangunan Tanjung Pinang
ebitetanisamasunggang@gmail.com

² STIE Pembangunan Tanjung Pinang
Mrahmank16@gmail.com

³ STIE Pembangunan Tanjung Pinang
selomitamanda11@gmail.com

ABSTRAK

Dinas perdagangan mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam penyelenggaraan serta penyediaan fasilitas untuk mamajukan dari sektor usaha kecil menengah. Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal sebagai Instansi pemerintahan yang mempunyai peranan untuk melindungi dan mengembangkan industri kecil menengah yang ada di Kota Tanjungpinang telah menyediakan suatu wadah yang bisa menampung dan memberikan saran perbaikan yang dibutuhkan bagi pebisnis khususnya kepada para pelaku usaha Industri kecil menengah dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mengetahui Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal Dalam Pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah di Kota Tanjungpinang. Informan dalam penelitian ini meliputi 1 orang pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang yang secara tugas pokok dan fungsi ada pada bidang Usaha Kecil Menengah, kemudian diambil 3 orang dari pelaku usaha yang ada di Kota Tanjungpinang Setelah dilakukan evaluasi terhadap permasalahan penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal Dalam Pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyuluhan, pelatihan maupun sosialisasi sangat minim dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal kepada para pengusaha IKM. Tidak hanya itu Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal belum tanggap dalam memberikan pembinaan kepada IKM hal ini dapat dilihat karena kurang tanggapnya Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal dalam menyelesaikan permasalahan IKM di Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci: Peran, Indsutri Kecil Menengah, Ekonomi

ABSTRACT

Riau Islands Province Trade Office has a role and a huge responsibility in the administration and the provision of facilities for promoting the sector of small and medium businesses. Government Tanjungpinang through the Department of Industry, Commerce Creative Economy and Investment as government agencies that have a role to protect and develop the small and medium industries in Tanjungpinang have to provide a container which can accommodate and provide suggestions for improvements needed for the businessman his specialty to the perpetrators Industrial small and medium enterprises in running and developing a business. The purpose of this study is basically know the role of the Creative Economy Department of Industry, Trade And Investment In Small and Medium Industries Development Actors in Tanjungpinang. Informants in this study include 1 employees Creative Economy Department of Industry Trade and Investment Tanjungpinang that the duties and functions exist in the field of Small and Medium Enterprises, and then taken three people from businesses in Tanjungpinan. After the evaluation of the problems of research it can be concluded that the role of the Department of Industry, Commerce and Creative Economy Investment Small and Medium Industries Development

Actors in Tanjungpinang not run well. It can be seen from the counseling, training and socialization is very minimal done by the Department of Creative Economy Department of Industry, Trade and Investment to the entrepreneurs of Small and Medium Industries. Not only is it the Department of Industry, Trade And Investment Creative Economy has not been responsive in providing guidance to Small and Medium Industries this can be seen as lack of response of the Department of Industry, Trade And Investment Creative Economy in solving the problems of Small and Medium Industries in Tanjungpinang.

Keywords: Role, Small and Medium Industries, Economy

PENDAHULUAN

Industri adalah suatu proses pengolahan suatu bahan mentah atau baku menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Berdasarkan perkiraan masa mendatang industri pengolahan pada masa mendatang cukup mempunyai peluang. Keadaan ini dimungkinkan oleh adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Tanjungpinang dan posisi yang strategis. Selanjutnya kondisi ekonomi semakin membaik dengan adanya pemulihan ekonomi menuju pematapan pembangunan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah.

Industri kecil menengah memegang peranan penting sebagai salah satu urat nadi perekonomian di Indonesia karena pada umumnya peredaran barang dagangan atau kebutuhan pokok sehari-hari yang melibatkan banyak pihak yang saling membutuhkan baik antar pulau maupun ekspor - impor pasti akan membutuhkan para pelaku industri kecil menengah (IKM). Dengan demikian industri kecil menengah sangat dibutuhkan untuk memajukan perekonomian suatu negara terlebih seperti negara kita yang termasuk dalam kategori negara berkembang.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 37/M-Ind/Per/6/2006 Tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil Dan Menengah (IKM) bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), perlu pemberian konsultansi untuk membantu mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh IKM sehingga industri dimaksud dapat menjadi unit usaha yang sehat, kuat dan berkembang kemudian dalam rangka pelaksanaan pemberian konsultansi sebagaimana dimaksud perlu peningkatan profesi dan pengembangan jasa konsultansi IKM dengan memanfaatkan potensi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk menghadapi laju pertumbuhan perekonomian yang telah dilaksanakan Kota Tanjungpinang daerah harus siap di segala bidang dalam menghadapi perdagangan bebas khususnya Perdagangan pasar bebas. Dinas perdagangan Provinsi Kepri mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam penyelenggaraan serta penyediaan fasilitas untuk mamajukan dari sektor industri kecil menengah. Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal sebagai Instansi pemerintahan yang mempunyai peranan untuk melindungi dan mengembangkan industri kecil menengah yang ada di Kota Tanjungpinang telah menyediakan suatu wadah yang bisa menampung dan memberikan saran perbaikan yang dibutuhkan bagi pebisnis khususnya kepada para pelaku usaha Industri kecil menengah dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagai pelaksana fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksana industri kecil menengah sangat menentukan progres industri kecil menengah. Sektor industri sebagai penggerak perekonomian telah mampu memberikan sumbangsih yang amat besar dan telah mampu menciptakan peluang kerja yang luas bagi masyarakat. Kemampuan industri bertahan di zaman IPTEK yang mengalami percepatan saat ini adalah suatu keharusan jika ingin terus dapat bersaing. Dalam merumuskan kebijakan indutri kecil menengah, pemerintah perlu mempertimbangkan pemanfaatan dana agar dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran bagi usaha industri kecil menengah yang betul-betul memerlukan bantuan dan binaan agar dapat mengembangkan usahanya kedepan agar lebih maju.

Sesuai dengan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang yang Membawahi Klinik Kemasan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan dunia usaha industri kecil menengah baik itu dipasar lokal maupun pasar manca negara. Oleh karena itu Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang berwenang melaukan koordinasi agar memastikan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sebagaimana mestinya dengan mengharapakan kerja sama dari seluruh pelaku usaha, masyarakat, intansi terkait, atau masyarakat pengrajin kerajinan tangan/handycraf untuk dapat berperan secara maksimal. Klasifikasi industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 98/M-IND/12/2012 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM disebutkan bahwa industri dengan nilai investasi (diluar tanah dan bangunan tempat usaha) seluruhnya sampai Rp 500.000.000,- untuk Industri Kecil

dan Rp 10.000.000.000,- untuk Industri Menengah. Industri kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu segmen industri yang dapat dijadikan tumpuan dalam penciptaan iklim wirausaha yang dapat menyerap tenaga kerja. IKM sudah terbukti ketangguhannya.

Ketangguhan IKM (Industri Kecil Menengah) terbukti dari pengalaman lalu ketika menghadapi guncangan ekonomi pada tahun 1997- 1998 dan krisis 2008-2009 bahwa kreatifitas dalam menciptakan desain yang unik telah memberikan kita keunggulan daya saing produk di pasar internasional. Industri kecil dan menengah (IKM) diharapkan menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025 dengan jumlah IKM yang terus meningkat diharapkan mampu berkontribusi 50 persen terhadap PDB. Pada tahun 2010 lalu, jumlah IKM di Indonesia telah mencapai 3,8juta usaha, yang berkontribusi terhadap PDB sekitar 10 persen. Namun saat ini, IKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 9,2 juta jiwa. Total nilai investasi di sektor IKM mencapai Rp 244 triliun dengan kemampuan produksi Rp 561 triliun dan ekspor US\$ 15 miliar.

Karakteristik inilah yang memberikan andil cukup signifikan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh yang bercirikan kerakyatan. Istimewanya IKM yang bertahan pada saat krisis ekonomi sebelum era reformasi sebagian besar adalah IKM yang belum dibekali oleh ilmu produktivitas, sistem manajerial yang baik, sistem keuangan yang mengatur arus keluar masuk modal atau keuntungan yang didapat di lembaga formal maupun non formal. Salah satu produksi industri kecil menengah dari jenis makanan kita mengenal hasil olahan ikan tenggiri seperti amplang dan kerupuk, pemanfaatan bahan baku utama berupa sumber daya alam lokal, bakat dan etnik tradisional daerah setempat merupakan jawaban dari perlunya industri kecil menengah di daerah. Ciri daerah melekat pada produk yang dihasilkan, sehingga dari ciri khas itulah menimbulkan pasar tersendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pertambangan, perikanan atau hasil laut, perkebunan, Potensi-potensi lain juga ada untuk digarap, semua potensi ini menunggu untuk ditumbuh kembangkan.

Masalah riil yang terjadi di masyarakat antara lain produknya belum memiliki daya saing. Belum mampu menyiapkan produk yang berkualitas secara berkelanjutan. Jiwa kewirausahaan masih rendah, minimnya pengetahuan dan informasi pasar serta belum mampu menjalin kemitraan dengan pihak lain. Pemerintah sebagai regulator wajib menjadikan IKM sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian melalui Ditjen IKM melakukan pembinaan IKM,

Revitalisasi Mesin/Peralatan IKM dan juga Program Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP). Program OVOP ini ditata dan dilaksanakan Instansi terkait dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal di kab/kota Provinsi Kepulauan Riau agar terjadi sinkronisasi yang berjalan seiring dan selaras serta saling mendukung. Kementerian Perindustrian berperan dalam membimbing perbaikan produk dan desain agar berkualitas global, Kementerian Perdagangan membimbing dalam promosi dan pemasaran global, Kementerian Koperasi dan UKM membimbing perbaikan manajemen dan keuangan serta Pemerintah Daerah melakukan perbaikan infrastruktur dan pembinaan masyarakat. Peran Koordinasi Dinas Pelaksana setingkat Provinsi mendorong IKM terus digalakkan oleh Dinas dibawahnya, Bidang Perdagangan sebagai bagian internal dari pembangunan nasional, yang mempunyai tugas dan fungsi pokok dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal serta klinik bisnis meliputi: Melakukan pengawasan barang beredar, Pemantauan Harga Sembako, Perencanaan pendirian bangunan pasar tradisional, Pengumpulan data perdagangan, Tempat perizinan membuat API (angka pengenal importir), Penyediaan informasi kepada pelaku industri kecil menengah, dan Melakukan pembinaan juga peningkatan usaha dan produk kemasan.

Berdasarkan kebijakan pemanfaatan dana untuk kemajuan IKM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tepat dalam penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas mutu produk usaha industri kecil menengah yang lebih baik. Karena dengan mutu juga kemasan yang baik menjaga aturan label kesehatan adalah merupakan suatu standar dimana terpenuhinya persyaratan dan keselamatan yang menyangkut produk kemasan itu sendiri.

METODE

Jenis penelitian ini mengaju pada sumber data yang digunakan, maka pengamatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari yang disusun dalam kalimat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan Wawancara, Mengkaji dokumen dan arsip, dan dengan Metode kepustakaan

Untuk mendapatkan suatu laporan penelitian yang baik dan terarah maka diperlukan data yang lengkap dan relevan dengan persoalan yang dihadapi, sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Narasumber (Informan), Peristiwa dan aktivitas, Tempat dan lokasi, dan Dokumen dan arsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan Menurut Soekanto (2002: 243: 244), peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”.

Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Lebih lanjut Soekanto (2002:243-244) mengatakan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Suatu peranan diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti ini teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik untuk mencapai tujuan. Miftah Thohah (dalam buku Harbani Pasolong, 2005: 53) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur

pelaksanaan penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rivai, 2004: 148).

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi peranan sangat penting didalam suatu organisasi, sebab peranan merupakan suatu konsep perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat atau seorang pemimpin kepada bawahannya sesuai dengan norma-norma. Menurut Ali (2002: 464) menjelaskan peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Ditambahkan oleh Ali (2002: 446) menjelaskan bahwa istilah peranan dipakai untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu.

Suhardono mengatakan (1994:15) peran adalah: “Peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan seseorang, yang menduduki suatu posisi”. Lebih lanjut dikatakan Suhardono (1994:62) yaitu: “Setiap Pelaku peran sadar akan posisinya. Karena hal menduduki posisi ini membawa konsekuensi berupa tekanan-tekanan yang datang dari sistem sosial dan belum tentu dapat dipenuhi, maka akan muncul dua kemungkinan. Pertama, pelaku akan memenuhinya secara lugas, atau kedua memenuhinya secara *artificial*”. Juga dijelaskan oleh Suhardono (1994: 7) yaitu: “Bagaimana seorang individu menilai dirinya sendiri dan orang-orang lain di Sekitarnya, kepiawaian seseorang dalam membawakan diri tersebut mempengaruhi orang lain, dan lebih banyak lagi, kepiawaian tersebut meliputi perilaku belajar dan motivasi, cara pemberian sanksi, konformitas dan independensi antar pelaku dalam kancah sosial”.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barang kali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul

karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan (Miftah Thoha, 2012: 10).

Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat serta diatur oleh norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1996:18), Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok orang yang memiliki status tertentu. Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur status yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa istilah peranan dipakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu. Seperti yang dikemukakan Soekanto (2009:146), peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas status. Peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut sebagai status subjektif. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa)

Menurut Narwoko dan Suyanto (2006:160) mengatakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut: (1) Memberi arah pada proses sosialisasi; (2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan; (3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan (4) Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap

orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan (Siswanto, 2012: 21).

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi: a) Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya. b) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. c) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. d) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

Industri Kecil Menengah

Berdasarkan pada undang undang no.9 tahun 1995 tentang usaha kecil yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan Penentuan Kompetensi tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta (Sudisman & Sari, 1996:5). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil menengah identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan dari jumlah pekerjanya yaitu (BPS,1999:250): (1) Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) Industri kecil dengan pekerja 5- 19 orang; (3) Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih

Tujuan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan suatu alasan untuk pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yaitu IKM tidak hanya memberikan penghasilan besar bagi tenaga kerja Indonesia namun dapat mengentaskan kemiskinan karena dapat membudidayakan sumber daya manusia pada daerah setempat dan dapat membangun ekonomi pedesaan. IKM berperan juga pada ekspor nonmigas dan dapat berkontribusi terhadap penerimaan ekspor walaupun tidak sebesar perusahaan besar. Pengembangan industri kecil menengah memiliki peranan besar dalam pengembangan industri manufaktur. Pengembangan industri skala kecil dapat mengatasi masalah pengangguran, menggunakan teknologi padat karya sehingga dapat memperbesar lapangan kerja dan kesempatan dalam berusaha.

Tantangan dan Masalah yang dihadapi IKM Beberapa masalah yang dihadapi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) yaitu: (1) Kelemahan dalam merebut pangsa pasar; (2) Pemodalannya yang terbatas dan keterbatasan dalam memperoleh jalur sumber pemodalannya; (3) Organisasi yang bersifat kecil dan terbatas; (4) Keterbatasan mitra kerja bisnis untuk saling tukar menukar informasi Penentuan Kompetensi; (5) Pembinaan yang masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap IKM Tantangan yang dihadapi dari segi omset, dibagi ke dalam dua jenis kategori: Pertama, bagi IKM dengan omset kurang dari Rp 50 juta secara umum tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan kestabilan usahanya walau dengan modal yang tidak besar. Kedua: bagi IKM dengan omset dari Rp50 juta sampai Rp 1 milyar, tantangan yang mereka hadapi adalah bagaimana cara mengekspansi bisnis mereka.

Kuncoro (1993) mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh IKM dengan omset Rp 50 juta – Rp 1milyar adalah: Belum terdapatnya manajemen dan administasi keuangan

yang baik dalam hal pengelolaan perusahaan. Masalah dalam menyusun membuat proposal dan studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank. Masalah dalam menyusun perencanaan bisnis dalam merebut pasar. Masalah akses teknologi bila pasar dikuasai oleh perusahaan tertentu dan selera konsumen cepat berubah. Masalah dalam memperoleh bahan baku dan tinggi nya harga bahan baku. Masalah perbaikan barang dan efisiensi. Sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal Dalam Pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik. dapat diketahui bahwa motivasi yang dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada Industri Kecil Menengah di Kota Tanjungpinang, walaupun menurut pengurus IKM perhatian masih kurang karena belum dapat memberikan motivasi kepada Industri kecil menengah untuk dapat berkarya dan membangun ekonomi masyarakat. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal hanya memberikan bantuan berupa Alat kepada pengusaha untuk selanjutnya dipergunakan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dalam bidangnya masing-masing dan pihak pemerintah juga sudah mengarahkan masyarakat untuk membuat usaha dengan meminjam modal kepada Lembaga Keuangan Mitra yang nantinya dapat membantu IKM di Kota Tanjungpinang.

REKOMENDASI

- a. Sebaiknya Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal tanggap dalam menghadapi permasalahan Industri Kecil Menengah mulai dari pendanaan hingga pelatihan untuk Industri Kecil Menengah.
- b. Sebaiknya dilakukan pengawasan secara intensif agar dapat diketahui kelemahan dan kekurangan bahkan permasalahan yang terjadi di setiap ikm yang ada.
- c. Tidak hanya Alat, pemasaran maupun kemasan juga harusnya menjadi perhatian Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal kepada IKM agar dapat lebih maju.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang ikut serta terlibat dalam penelitian ini, serta rekan rekan saya semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas semua support dan bantuan nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. A (2002). *Organisasi dan manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bagong, S J. & Narwoko, D. (2004). *Sosiologi teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana Media Group Cipta.
- BPS. (1999). *Statistical Yearbook of Indonesia 1998*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Effendi, S., & Singarimbun, M. (1995). *Metode penelitian survai*. Penerbit Aksara.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah*. Jakarta.
- Labolo, M. (2005). *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Moleong, L J. (2000). *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, T. (2005). *Metodologi ilmu pemerintahan*. Jakarta: CV. Rineka Ndraha,
- Pasolong, H. (2005). *Metode penelitian administrasi: untuk organisasi profit dan non-profit*. Makassar: Lembaga Penerbitan Uhnas (Lephas)
- Rasyid, R. (2000). *Pokok-pokok pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2004). *Manajemen sumber daya manusia dari teori ke praktik*. PT. Raja Grafindo Persada
- Siswanto. (2011). *Pengantar manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soehardono, E. (1994). *Teori peranan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2009). *Teori peran*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Sudisman, U., & Sari, A., (1996). *Undang-Undang Usaha Kecil 1995 dan Peraturan Perkoperasian*. Jakarta: Mitrainfo.
- Sugiyono, (2011). *Metode penelitian administratif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Suhady, I. (1999). *Kelembagaan aparatur pemerintah*. Jakarta: LAN RI.
- Suhardono. (1994). *Teori peran: konsep, derivasi, dan implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supriatna, T. (2007). *Administrasi birokrasi dan pelayanan publik*, Nimas Multima, Jakarta.
- Syafei, I. K. (2005). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Artikel Luaran Abdimas

Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*, Jilid I. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Thoha, M. (2012). *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). Manajemen pemberdayaan: Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.